

BAB II

INEFEKTIVITAS PROGRAM HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

DAN FENOMENA KEMISKINAN DI ACEH

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki perekonomian tergolong rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata kemiskinan Indonesia. Keberadaan program *Human Resources Development* (HRD) oleh Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) pada asalnya diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program kerja yang ditawarkan. Bab ini akan menjelaskan tentang inefektivitas program HRD dan fenomena kemiskinan di Aceh.

Secara sederhana, bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, menggambarkan tentang program HRD yang ada di Aceh. Bagian ketiga, menggambarkan tentang fenomena kemiskinan yang ada di Aceh. Sedangkan bagian keempat menggambarkan tentang usaha pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh.

2.1 Program *Human Resources Development* di Aceh

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) merupakan sebuah kerja sama regional Asia Tenggara yang dibangun pada tahun 1967. ASEAN menyadari betul akan besarnya kesenjangan yang ada antar negara anggota, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara anggota ASEAN mulai membentuk beberapa kerja sama sub-regional. Diawali dengan pembentukan GMS (*Greater Mekong Subregion*) yang beranggotakan Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam (www.adb.org, 2017).

Keberadaan GMS yang dipelopori oleh Cina memotivasi ASEAN untuk mengimplementasikan cara tersebut. Palsalnya, ekonomi domestik Cina terus memberikan kemajuan seiring dengan terbentuknya beberapa kerja sama sub regional yang dianggap sebagai pengembangan posisi strategis. Target yang ingin dicapai Cina juga adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi domestik serta meningkatkan industrialisasi kondisi kehidupan wilayah sasaran (RSIS, 2009: 8-9). Sehingga, ASEAN mulai membentuk beberapa kerja sama sub-regional baik dengan Cina, negara anggota ASEAN itu sendiri dan negara-negara Asia lainnya.

Seiring berkembangnya kepentingan atas integrasi ekonomi, negara-negara anggota ASEAN banyak melakukan kerja sama ekonomi sub-regional dalam lingkup regional ASEAN (Bappenas, 1997: 1-2). Fenomena ini juga memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat dengan kehadiran SIJORI (Singapore-Johor-Riau), IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapore *Growth Triangle*), BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Triangle*), IMT-GT

(Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle*) dan CLV (Cambodia, Laos and Vietnam). Pembentukan sub-regionalisme ini berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas integritas ASEAN terutama berkaitan dengan konektivitas (ADB, 2015: 14). Selain itu, sub-regionalisme ini juga dibentuk untuk dapat meningkatkan koordinasi demi mencapai tujuan-tujuan untuk kemajuan negara-negara tersebut.

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan sebuah kerja sama sub-regional atau sering disebut sebagai kerja sama segitiga pertumbuhan. Proses kerja sama regional seperti ini, terutama untuk Asia Tenggara dapat menjadi upaya untuk menjalin keunggulan komparatif wilayah tersebut dan membangun keunggulan kompetitif untuk menghadapi blok ekonomi negara lain (Baiquni, 1998: 58).

IMT-GT sendiri, telah berdiri sejak tahun 1993 bekerja sama dengan 14 Provinsi dari Thailand yakni; Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Hatatalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga dan Phuket. Juga 8 Negara bagian dari Malaysia yakni; Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis dan Selangor. Serta 10 Provinsi pulau Sumatera dari Indonesia yakni; Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan (IMT-GT Roadmap, 2009: 3-4).

Kerja sama ini merupakan salah satu kerja sama sub-regional dalam bidang ekonomi yang dijalin oleh negara-negara anggota ASEAN. Secara umum, berdirinya kerja sama IMT-GT merupakan wadah yang sejalan dengan cita-cita ASEAN yakni

memiliki visi untuk meningkatkan integrasi ekonomi melalui strategi segitiga pertumbuhan. Strategi ini juga dilakukan di beberapa wilayah negara ASEAN lainnya melalui segitiga pertumbuhan negara ASEAN lainnya seperti BIMP-EAGA⁵ dan SIJORI⁶ (Yussof dan Kasim, 2003: 42).

Berdirinya IMT-GT berfungsi untuk memfasilitasi dan mempromosikan perdagangan serta investasi terhadap wilayah sasaran di negara anggota. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut maka dibentuk beberapa bidang atau disebut sebagai *Working Group* dalam kerja sama ini, diantaranya; *trade and investment, agriculture and agroindustry, infrastructure and transport, halal products and services, tourism* dan *human resources development* (IMT-GT Roadmap, 2009: 10).

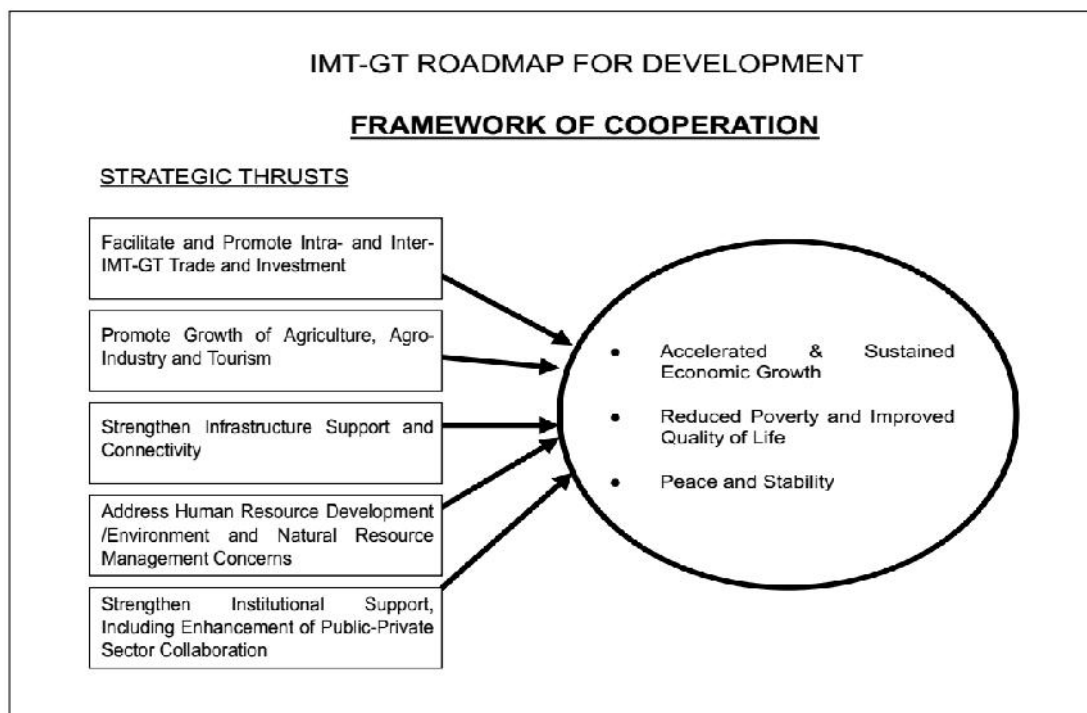
Meski telah terbentuk sejak tahun 1993, namun kerja sama ini sempat vakum dan mulai berusaha mengimplementasikan dan membentuk formulasi program-program yang ada secara lebih sistematis dengan membentuk periode dalam menjalankan programnya (IMT-GT, 2009: 7-8). Periode pertama pada tahun 2007-2011, periode kedua 2012-2016 dan akan dilanjutkan kembali pada periode ketiga 2017-2021.

⁵BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) adalah wilayah pertumbuhan yang meliputi seluruh daerah Brunei Darussalam, 10 Provinsi Indonesia di pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua, negara bagian Malaysia Sabah, Sarawak dan wilayah federal Labuan, serta Mindanao dan provinsi Palawan di Filipina (www.adb.org).

⁶SIJORI (Singapore-Johor-Riau Growth Triangle) adalah segitiga pertumbuhan untuk meningkatkan kekuatan kompetitif ketiga daerah tersebut melalui penghubungan logistik, transportasi dan fasilitas keuangan dari Singapura dengan sumber daya alam dan tenaga kerja yang berasal dari Johor dan Riau (eresources.nlb.gov.sg).

Lebih rinci, fungsi dan tujuan IMT-GT itu sendiri, telah tertuang melalui *roadmap* yang telah disepakati bersama dengan beberapa program yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lainnya.

Gambar 2.1
Kerangka Kerja Sama IMT-GT



Sumber: IMT-GT Roadmap 2007-2011

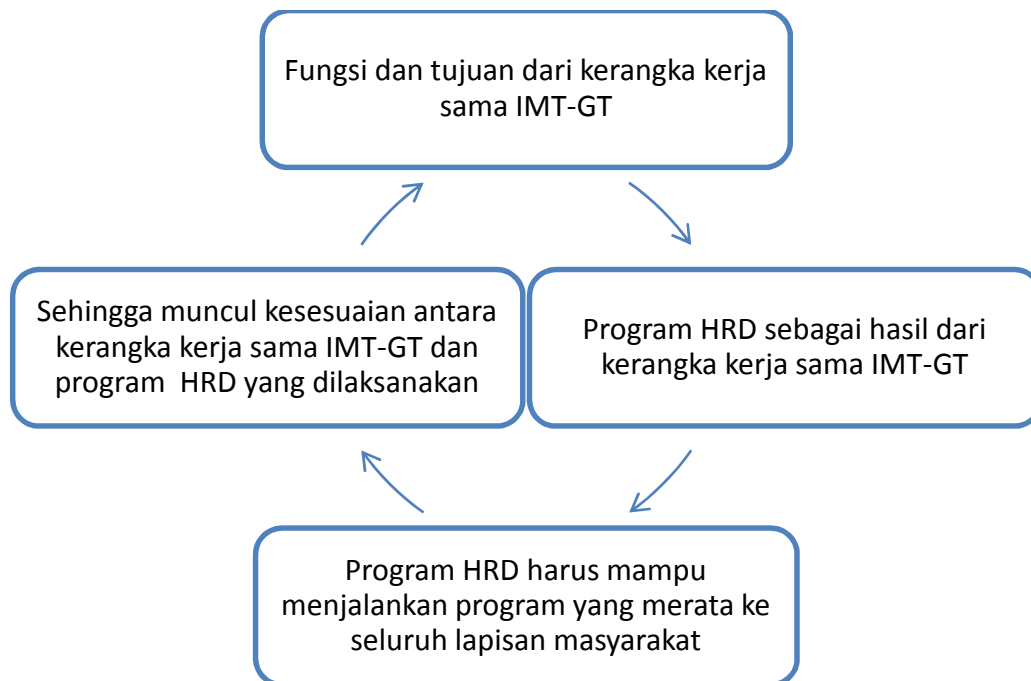
Melalui gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan berdirinya IMT-GT adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan stabilitas dan perdamaian. Tujuan ini berusaha dicapai oleh IMT-GT melalui program-program dalam beberapa bidang

yang ada, yakni dalam bidang *trade and investment, agriculture, agro-industry* dan *tourism, infrastructure, human resources development* serta menjalin kolaborasi dengan sektor swasta.

Tujuan berdirinya IMT-GT tersebut saling berkaitan antara satu program dengan program lainnya. Seperti pada program HRD sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan kemampuan kompetensi serta meningkatkan mobilitas terhadap tenaga kerja (IMT-GT, 2009: 8). Sehingga, dalam perjalanannya terdapat korelasi antara tujuan program HRD dengan tujuan umum yang ingin dicapai oleh IMT-GT.

Gambar 2.1

Skema Kesesuaian Kerangka Kerja Sama IMT-GT dan Program HRD



Keterangan: Gambar diolah oleh peneliti berdasarkan penjelasan sebelumnya

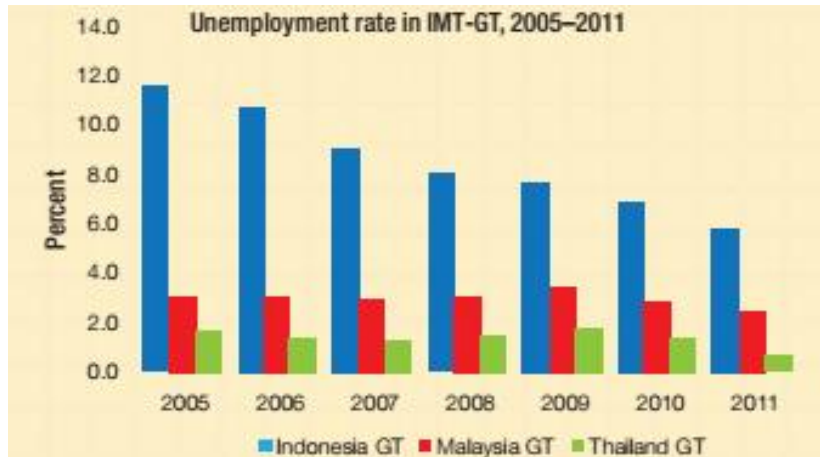
Melalui skema di atas, dapat dijelaskan bahwa fungsi serta tujuan IMT-GT telah diimplementasikan melalui beberapa program yang akan dijalankan, salah satunya adalah program HRD. Maka, sesuai dengan itu program HRD harus diterima merata oleh seluruh lapisan masyarakat agar sejalan dengan fungsi dan tujuan awal IMT-GT yakni mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan stabilitas dan perdamaian.

Konsistensi tujuan IMT-GT terutama HRD secara khusus ditunjukkan dengan usahanya pada periode berikutnya yakni 2012-2016, setelah sebelumnya pembentukan dan pelaksanaan *road map* pada periode 2007-2011. Melalui tujuan yang sama, HRD ingin meminimalisir kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah sasaran kerja sama yang dianggap masih terbelakang. Khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mempromosikan mata pencaharian bagi wilayah tersebut (IMT-GT Blueprint, 2012: 5). Strategi ini dikolaborasikan dengan usaha untuk mengembangkan daya saing serta perbaikan mobilitas tenaga kerja (IMT-GT Blueprint, 2012: 6).

Sebagai kerja sama yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, program-program IMT-GT saling berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan tujuan tersebut. Sedangkan, untuk HRD sendiri berusaha menurunkan angka pengangguran demi meminimalisir ketimpangan ekonomi yang ada. Namun, meski mengalami penurunan pada jumlah angka pengangguran, Indonesia masih

tertinggal jika dibandingkan Malaysia dan Thailand. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:

Grafik 2.2
Penurunan Angka Pengangguran Negara Anggota IMT-GT Tahun 2005-2011



Sumber: *IMT-GT Statistical Information Brief*

Melalui grafik di atas dapat dipahami bahwa meskipun mengalami penurunan, namun, Indonesia merupakan negara yang memiliki angka pengangguran tertinggi dibandingkan dengan negara anggota lainnya yakni Malaysia dan Thailand. Penurunan angka pengangguran di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2011 tercatat tidak lebih dari 2% setiap tahunnya.

Penurunan angka pengangguran tersebut tentu memberikan peluang besar baik terhadap peningkatan ekonomi maupun sumber daya manusia wilayah sasaran sebagai tujuan dari program HRD. Aceh sebagai salah satu wilayah sasaran program IMT-GT sejak tahun 2007 terlihat terus berusaha untuk memperbaiki perekonomiannya. Keadaan ini tergambarkan melalui beberapa kerja sama dan

program kerja yang berusaha dilaksanakan oleh Aceh demi mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah program *pro-poor* Aceh oleh Bappeda Aceh (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) bekerjasama dengan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Indonesia dan beberapa program lainnya, salah satunya HRD dalam naungan kerja sama IMT-GT.

Perbaikan ekonomi yang sedang dilakukan oleh Aceh dibuktikan dengan keterbukaan dirinya terhadap investasi maupun kerja sama asing yang ada. Pada laporan yang ditulis oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh, menyatakan bahwa Aceh memiliki visi untuk dapat menjadi salah satu daerah investasi utama pada tahun 2017. Visi ini bertujuan untuk mencapai misi dalam membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi, melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan pemerintah Aceh maupun swasta serta meningkatkan sumber daya manusia (Badan Investasi dan Promosi Aceh, 2014: 4-5).

Usaha Aceh ini menjadi salah satu kesadaran akan pentingnya stabilitas ekonomi suatu daerah demi menciptakan masyarakat yang berkecukupan dan memiliki pekerjaan yang layak. Pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Langstaff, Weyer dan Carton dalam tulisan Fernandez dan Powell, dijelaskan melalui pentingnya pengembangan keterampilan demi pengurangan kemiskinan dengan pelatihan seperti misalnya dalam bidang pertanian atau kewirausahaan, dengan sasaran utama masyarakat pedesaan, perempuan, orang-orang cacat, etnis minoritas dan pengangguran (Fernandez dan Powell, 2009: 72-73).

Sejalan dengan itu, pengembangan sumber daya manusia sangat bergantung pada pengembangan dan persamaan gender, tingkat kemiskinan, pertumbuhan populasi dan indeks pengembangan SDM (Evans, 2010: 14-17). Oleh karena itu, dapat disadari akan pentingnya pengembangan SDM dalam perbaikan suatu daerah maupun negara itu sendiri.

Yussof dan Kasim (2003; 45) menjelaskan bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang lebih dikenal dengan tenaga kerja sangat penting untuk mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berdasarkan pada dua isu penting. Yakni, tenaga kerja yang memadai untuk kebutuhan ekonomi dan kualitas dari SDM itu sendiri (Yussof dan Kasim, 2003: 45).

Prinsip serta tujuan IMT-GT untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan sumber daya manusia digambarkan melalui program-program HRD yang ada. Beberapa program HRD yang ingin dijalankan di Indonesia pada periode 2007-2011 seperti; pengenalan kebijakan nasional untuk pengembangan sumber daya manusia yakni "*The Three in One (3 in 1) Policy*" yang berfungsi dalam strategi pelatihan, sertifikasi dan penempatan (IMT-GT WGHRD, 2007: 1-6). Lalu dilanjutkan dengan penyelenggaraan kegiatan "Harmonisasi, Akreditasi dan Standarisasi Pengembangan SDM" pada bidang pariwisata, kesehatan, keperawatan serta konstruksi dan pelayaran (Ditjen Binalattas WGHRD IMT-GT, n.d: 2).

Program lainnya yang ingin dijalankan pada periode selanjutnya, yakni 2012-2016 di antaranya; kelanjutan program "Harmonisasi, Akreditasi dan Standarisasi Pengembangan SDM" dan penyamaan standar untuk optimalisasi SDM dengan

mengimplementasikan program yang ada di wilayah Sumatera. (Ditjen Binalattas WGHRD IMT-GT, n.d: 3-4). Pada program-program yang diusung pada periode 2007-2011 dan 2012-2016 terlihat tidak ada kesinambungan antar program, sehingga tidak diketahui apakah program tersebut berjalan, sukses atau justru gagal. Hal tersebut dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Realisasi Program HRD

Tahun	Program	Status
2007	“The Three in One (3 in1) Policy”	Rencana
2008	Seminar untuk mempromosikan partisipasi wanita dalam pasar kerja, workshop dalam pengembangan kemampuan dan ketereampilan serta study visit untuk pengelolaan dan mobilitas individu	Rencana
2011	“Harmonisasi, Akreditasi, dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia” di bidang pariwisata, kesehatan keperawatan, konstruksi dan pelayaran.	Rencana
2012	“Harmonisasi, Akreditasi, dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia” di bidang pariwisata, kesehatan keperawatan, konstruksi dan pelayaran.	Diskusi
2013	Diskusi mengenai WGHRD yang diharapkan secara konkret dapat mengimplementasikan programnya di wilayah Sumatera, demi optimalisasi SDM dan kesiapan untuk menghadapi MEA	Diskusi
2016	Uninet Strategic Action Plan dan Workshop on Competency Skills Standard	Selesai dan Rencana

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber resmi WGHRD IMT-GT

Melalui tabel di atas dapat dipahami bahwa, selama dua periode program HRD IMT-GT berjalan, program-program yang diusung masih sebatas rencana dan diskusi antar negara anggota yang belum terealisasi bentuk nyatanya. Meski program *Uninet Strategic Action Plan* pada tahun 2016 dinyatakan selesai, namun program tersebut pun masih berbentuk rencana untuk merencanakan program apa yang akan dilaksanakan dibawah naungan Uninet. Sehingga, program tersebut dikatakan berhasil karena telah melaksanakan pertemuan untuk menyusun *action plan*, namun yang rencana yang ingin dicapai pada action plan belum berjalan.

Selain itu, untuk proyek yang dilaksanakan oleh HRD itu sendiri terkesan sangat lamban jika dibandingkan dengan program-program IMT-GT lainnya. Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Status Program HRD dengan Program IMT-GT lainnya

Program	Proyek	Status
<i>Trade and Investments</i>	1.Memfasilitasi perdagangan dan investasi antar wilayah perbatasan 2.Promosi perdagangan dan Investasi 3. <i>Economic and Business Information Compilation and Dissemination</i> (Pengembangan Website IMT-GT)	Akan berjalan Akan berjalan Selesai
<i>Agriculture and Agroindustry</i>	1.Mempromosikan investasi pada produksi dan proses produk agrikultur wilayah IMT-GT 2.Kerja sama antara tiga pihak (Perak, PT Trimitra Sumberbuana dan IMT-GT) terkait kelapa sawit	Akan berjalan Selesai

	<p>3.Persiapan dan penyebaran kesempatan bisnis pada bidang agrikultur dan ago-industri di wilayah IMT-GT</p> <p>4. IMT-GT Halal expo</p>	<p>Akan berjalan</p> <p>Selesai</p>
<i>Transport Linkages</i>	<p>1.IMT-GT Four Connectivity Corridors</p> <p>2.Pembangunan Jalan (Patani-Yala-Betong-Penang)</p> <p>3.Pembangunan jalan kereta api</p> <p>4.Transportasi laut</p> <p>5.Transportasi udara</p>	<p>Selesai</p> <p>Akan berjalan</p> <p>Akan berjalan</p> <p>Akan berjalan</p> <p>Selesai</p>
<i>HRD and Labour Mobility</i>	<p>1.Akreditasi dan program pelatihan</p> <p>2.<i>Mutual Recognition Arrangement (MRA)</i></p> <p>3.Uninet</p> <p>4.Memfasilitasi mobilitas pekerja melalui pelatihan tenaga ahli di wilayah IMT-GT</p>	<p>Akan berjalan</p> <p>Direncanakan</p> <p>Akan berjalan</p> <p>Direncanakan</p>
<i>Environment and Natural Resource Management</i>	<p>1.Pengembangan penguatan kerja sama terkait proteksi SDA di wilayah IMT-GT</p> <p>2.Mempromosikan penggunaan <i>environmentally-friendly technologies</i></p> <p>3.Kerja sama pada bidang pada bidang pengawasan dan keperdulian publik terhadap SDA</p>	<p>Akan berjalan</p> <p>Akan berjalan</p> <p>Direncanakan</p>

Sumber: The IMT-GT Roadmap 2007-2011 Action Plan: Status and Updates

Melalui tabel di atas dapat dipahami bahwa dari berbagai proyek yang dilaksanakan program-program IMT-GT selama rentang waktu 2007-2011, ada yang telah selesai, akan berjalan dan direncanakan. Untuk proyek yang ada program HRD sendiri, belum ada proyek yang statusnya telah selesai dilaksanakan, melainkan dua berstatus akan berjalan dan dua lainnya berstatus direncanakan. Program HRD dan *environment and*

natural resource management adalah program yang tergolong lambat jika dibandingkan dengan program lainnya berdasarkan status dari proyek yang ada.

Jika dibandingkan, program-program yang hasilnya akan terlihat nyata dalam rentang waktu tertentu lebih banyak proyek yang berstatus akan berjalan dan selesai dibandingkan dengan program yang sifatnya tidak memberikan hasil langsung dan cepat seperti HRD. Hal ini memperlihatkan inefektivitas program HRD berdasarkan rentang waktu status keberhasilan program-program HRD.

Berbagai program yang masih berbentuk rencana dan diskusi, masih berbentuk secara umum dan belum tersepesifikasi untuk dilaksanakan di Provinsi atau negara bagian tertentu. Namun, secara khusus program HRD yang akan dijalankan di Aceh adalah program Uninet yang dibawah oleh Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sebagai perwakilan dari Provinsi Aceh. Berdasarkan presentasi dari Bapak Muzailin Affan sebagai Ketua Sekretariat Uninet di Banda Aceh menyatakan bahwa, program Uninet dalam mengembangkan riset akan sangat bermanfaat, baik untuk Universitas, pengajar dan pelajar dari anggota juga pengembangan yang menguntungkan dalam kerangka kerja sama IMT-GT (Presentasi Muzailin Affan pada The 6th IMT-GT WGHRD, 2016).

Beberapa program Uninet yang rencananya akan dilaksanakan di Aceh antara lain; *Joint Conferences*, yakni melaksanakan konferensi dan melakukan lomba karya tulis ilmiah antar mahasiswa negara anggota. *Scholarship Joint Program*, program ini dilaksanakan antara Unsyiah, Universitas Teknikal Melaka Malaysia (UTeM) dan Prince of Songkla University (PSU). *Student and Staff Mobility*, di antaranya seperti

pertukaran pelajar, pegawai serta budaya. *Plant Tissue Culture Project*, merupakan penanaman yang dilakukan secara cepat untuk pengembangan tanaman-tanaman yang di anggap menguntungkan. *Energy Saving and Green Building Project*, yakni menciptakan *Green Curriculum dan Training Center* di negara bagian Melaka melalui UTeM dan kota Banda Aceh melalui Unsyiah.

Sayangnya, baik program HRD maupun Uninet secara khusus tidak ada yang berjalan secara efektif di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan Presentasi mengenai Uninet pada pertemuan *The 6thIMT-GT WGHRD* yang dilaksanakan September 2016 lalu, menyatakan bahwa program Uninet masih berupa usulan yang dijabarkan melalui program-program di atas (Presentasi IMT-GT Uninet pada *The 6th IMT-GT WGHRD*, 2016). Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Muzailin Affan bahwa memang program Uninet tersebut masih sebatas rencana yang akan dilakukan pada periode mendatang yakni 2017-2021, dan belum ada satupun yang terlaksana di Aceh⁷.

Uninet sendiri yang dibawah oleh IMT-GT, diresmikan keberadaannya pada tahun 1996. Pada awalnya, kerja sama ini hanya beranggotakan delapan universitas dari negara anggota IMT-GT diantaranya; Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Andalas dari Indonesia. Universiti Teknologi MARA, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Sains Malaysia dari Malaysia. Serta Prince of Songkla Univeristy dan Thaksin Univeristy dari Thailand. Namun, pada

⁷Wawancara dilakukan via sambungan telepon pada Sabtu, 4 Maret 2017 pukul 08.15 WIB.

2003 Univeristas Riau juga ikut bergabung dalam skema kerja sama ini (unsyiah.ac.id, 2015).

Pada pertemuan *Action Plan* IMT-GT Uninet, pidato Bapak Samsul Rizal sebagai Rektor Unsyiah menjelaskan tentang peran dari Uninet. Keberadaan Uninet sendiri bertujuan untuk menciptakan kolaborasi antara pengajaran dan penelitian, demi mendorong dan mengembangkan penelitian kolaboratif, seminar bersama, *workshop* dan lainnya. Kegiatan akademik ini bertujuan untuk menciptakan pertukaran ide dan pemikiran antara mahasiswa dengan akademisi dalam berbagai pengalaman dan keahlian untuk dapat mendukung dalam penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan IMT-GT itu sendiri (Presentasi Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng pada Workshop IMT-GT Uninet Strategic Action Plan 2016).

Sesuai dengan visi dari program HRD IMT-GT yakni untuk mengembangkan keterampilan dan sumber daya manusia, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan memperkuat lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (IMT-GT Blueprint, n.d.: 3). Tujuan tersebut ingin digambarkan dengan kehadiran Uninet pada program HRD di kerangka kerja sama IMT-GT. Ironisnya, meski Uninet merupakan bagian dari program HRD, namun program HRD tidak menasar langsung pada masyarakat miskin yang butuh dikembangkan. Melainkan kepada para pelajar, mahasiswa, akademisi dan staf akademisi (Presentasi IMT-GT Uninet pada The 6th IMT-GT WGHRD, 2016. Tentu hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan program dan program yang direalisasikan.

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program HRD IMT-GT bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial wilayah terpencil di negara anggota. Hal ini sejalan dengan tujuan IMT-GT secara umum, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia. Meski begitu, program HRD IMT-GT yang ada tidak efektif dalam menjalankan programnya di Aceh. Salah satu program HRD yang ada di Aceh yakni *University Network (Uninet)* pun masih dalam bentuk rencana untuk dijalankan di Aceh. Program ini bertujuan mendorong dan mengembangkan penelitian serta pertukaran ide antara mahasiswa dan akademisi. Selain itu, program ini tidak menasar langsung pada masyarakat miskin yang butuh dikembangkan. Melainkan pada pelajar, mahasiswa, akademisi dan staf akademisi yang pada dasarnya sudah tergolong sebagai sdm yang berkembang.

2.2 Permasalahan Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pelik yang berusaha ditangani oleh seluruh negara di dunia. Kondisi ekonomi suatu wilayah masih mejadi penentu tingkat kesejahteraan suatu wilayah atau negara tersebut. Menurut WHO (*World Health Organization*), kemiskinan didefinisikan sebagai individu yang berpenghasilan rendah sehingga dapat berdampak pada kelangsungan kehidupan dan kesehatannya di masa depan (WHO, 2017). Sedangkan menurut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), kemiskinan merupakan keadaan ketika pendapatan sebuah keluarga gagal untuk memenuhi batas minimum

penghasilan di wilayah tersebut. Hal ini didasarkan pada keluarga dan disesuaikan dengan jumlah anggotanya. Sedangkan, standar kemiskinan ekstrim menurut dunia internasional adalah, apabila penghasilannya tidak melebihi satu dolar per harinya (UNESCO, 2016).

Pengukuran kemiskinan yang digunakan Indonesia secara umum menggunakan standar Bank Dunia, namun perbedaannya terletak pada penghitungan kalori atau konsumsi beras menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menggunakan standar mata uang Dolar Amerika. BPS menggunakan patokan kebutuhan makanan sebanyak 2100 kalori, dengan konsumsi beras sebanyak 360kg untuk perkotaan dan 240kg per kapita per tahun untuk perdesaan. Sedangkan, Bank Dunia menggunakan standar 50 dolar untuk pengeluaran kebutuhan makanan di perdesaan dan 75 dolar untuk di perkotaan (Bappeda, n.d.: 10-11).

Secara sederhana, kemiskinan dapat di artikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak tersedianya asset yang dibutuhkan (Busra, n.d.: 4). Kemiskinan itu sendiri menurut Winardi dalam tulisan Busra, terbagi atas dua dimensi yakni kemiskinan pendapatan dan non pendapatan. Kemiskinan dalam dimensi pendapatan adalah kemiskinan yang diderita akibat rendahnya pendapatan yang diterima, sedangkan kemiskinan dalam dimensi non pendapatan dicirikan dengan ketidakmampuan, ketidakterwakilan dan ketidakbebasan (Busra, n.d.: 4-5). Dewasa ini, kemiskinan identik didefinisikan dengan kemiskinan dalam dimensi pendapatan karena sering menjadi standar atas penilaian seseorang, serta lebih mudah diukur.

Sebagai instrumen terkuat saat ini, ekonomi dianggap paling mampu untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup negara-negara berkembang. Pertumbuhan cepat dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting saat ini untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kesempatan kerja, serta membuka wawasan untuk mengenyam pendidikan (DFID, n.d.: 2). Berdasarkan data Global Finance, Indonesia berada pada urutan delapan puluh tiga sebagai “*the poorest countries in the world*” (www.gfmag.com, 2015), hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya Indonesia masih memiliki perekonomian yang belum sepenuhnya baik dan merata.

Selain instrumen ekonomi, pendidikan juga dianggap instrument penting lainnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan SDM yang dapat menjadi faktor utama keberhasilan pemabangunan di suatu negara melalui tersedianya kualitas SDM yang siap bersaing di era globalisasi (Majid, 2014: 20). Menurut *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-12 dari 12 negara di Asia. Hal ini diakibatkan karena rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki daya saing yang rendah (Majid, 2014: 16). Sehingga, permasalahan ini perlu diperhatikan lebih dalam terutama mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki begitu banyak potensi.

Aceh sebagai salah satu wilayah paling barat di Indonesia memiliki pertumbuhan yang lambat dan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hampir semua wilayah lain di Indonesia (Bank Dunia, 2008: 9).

Keadaan ini juga terpengaruh karena konflik internal, separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bencana tsunami. Pada tahun 2004, angka tingkat kemiskinan keseluruhan di Aceh sebesar 28,4%, angka ini jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang hanya sebesar 16,7% (Bank Dunia, 2008: 12-14).

Selain itu, tingkat kemiskinan di Aceh juga masih tergolong jauh di atas angka rata-rata nasional yang membuat Aceh harus lebih bekerja keras demi pengentasan kemiskinan di wilayahnya (Bappeda, 2007: 3-4). Kemiskinan di Aceh menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Penilaian Sosial-Ekonomi di Aceh Tahun 2011-2014

No	Indikator Penilaian Sosial-Ekonomi di Aceh	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	7,43	7,88	9,1	8,38
2.	Upah Minimum Provinsi (UMP) Per Bulan (Rupiah)	1.350,000	1.400,000	1.550,000	-
3.	Penduduk Miskin Per Provinsi (Persen)	19,57	19,46	17,60	-
4.	Garis Kemiskinan Perdesaan Per Provinsi (Rupiah/Kapita/Bulan)	292,085	308,162	319,416	-

Sumber: Data diolah Dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2013

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan yang sedikit pada beberapa indikator-indikator sosial-ekonomi yang ada di Aceh. Seperti pada jumlah pengangguran dan TPT⁸ terdapat peningkatan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2011-2013, yakni 7,43, 7,88 dan 9,1 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 8,38. Kemudian, jumlah UMP di Aceh hanya mengalami peningkatan tidak lebih dari Rp. 200.000 setiap tahunnya. Meski terdapat penurunan pada jumlah penduduk miskin di Aceh, namun terdapat peningkatan setiap tahunnya sejak 2011-2013 pada garis kemiskinan⁹ perdesaan di Aceh yakni 292,085, 308,162 dan 319,416.

Menurut Badan Pusat Statistik, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dimensi lain yang perlu diperhatikan dari persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Sehingga, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan (Badan Pusat Statistik Aceh, 2015: 3-5).

Menurut laporan dari Bappeda bekerja sama dengan UNICEF (Bappeda, n.d.: 19-24), ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Aceh. Pertama, sebaran penduduk miskin lebih banyak di perdesaan dibandingkan dengan

⁸Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

⁹Garis Kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak.

perkotaan. Sehingga, meskipun terdapat jumlah penurunan penduduk miskin ternyata relatif tidak diikuti dengan perubahan komposisi sebaran penduduk miskin yang ada di Aceh. Kedua, besarnya gap garis kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana dalam periode 2007-2010, garis kemiskinan perkotaan meningkat dari Rp.246,375 menjadi Rp.308,306. Sedangkan wilayah perdesaan Rp.218,143 hanya meningkat menjadi Rp.278,389.

Ketiga, meski terdapat peningkatan terhadap jumlah peserta didik dalam masing-masing tingkat pendidikan, namun, hal ini bukan berarti Aceh telah menyediakan fasilitas pendidikan yang baik akan tetapi kecenderungan mobilitas penduduk menuju daerah lain yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sehingga menunjukkan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah Aceh serta kurangnya kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM di Aceh.

Tabel 2.4
Persentase Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Aceh

Kabupaten/ Kota	Persentase (%)					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Simeulue	34,09	33,80	32,26	26,45	24,72	23,63
Aceh Singkil	29,20	28,41	28,54	23,27	21,06	19,39
Aceh Selatan	26,98	24,58	24,72	19,40	17,50	15,93
Aceh Tenggara	24,63	23,56	21,60	18,51	16,77	16,79
Aceh Timur	30,02	29,85	28,15	24,05	21,33	18,43
Aceh Tengah	27,68	26,68	24,41	23,36	21,43	20,10
Aceh Barat	35,50	34,54	32,63	29,96	27,09	24,43
Aceh Besar	29,40	28,66	26,69	21,52	20,09	18,80
Pidie	36,01	35,32	33,31	28,11	25,87	23,80
Bireuen	29,70	29,05	27,18	23,27	21,65	19,51
Aceh Utara	35,87	34,98	33,16	27,56	25,29	23,43
Aceh Barat Daya	28,29	28,30	28,63	23,42	21,33	19,94
Gayo Lues	33,97	33,51	32,31	26,57	24,22	23,91
Aceh Tamiang	24,50	23,89	22,19	22,29	19,96	17,99
Nagan Raya	36,18	35,25	33,61	28,11	26,22	24,07
Aceh Jaya	31,28	30,42	29,28	23,86	21,86	20,18
Bener Meriah	28,76	27,98	26,55	29,21	26,58	26,23
Pidie Jaya			35,00	30,26	27,97	26,08
Banda Aceh	8,37	8,25	6,61	9,56	8,64	9,19
Sabang	29,78	28,56	27,13	25,72	23,89	21,69
Langsa	14,98	13,95	14,25	17,97	16,20	15,01
Lhoksumawe	15,90	14,25	12,75	15,87	15,08	14,07
Subulussalam			30,16	28,99	26,80	24,36
Provinsi	28,69	28,28	26,65	23,53	21,80	20,98

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa meski hampir seluruh Kabupaten/Kota terhitung sejak 2005-2010 mengalami penurunan dalam garis kemiskinan, namun angka di atas juga menggambarkan tentang ketimpangan wilayah-wilayah perkotaan dan perdesaan. Seperti Banda Aceh, Langsa dan Lhoksumawe yang secara geografis berdekatan dan termasuk wilayah perkotaan memiliki angka garis kemiskinan yang jauh jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah perdesaan lainnya yang cenderung jauh dari perkotaan seperti Nagan Raya, Aceh Barat, Pidie dan Aceh Besar.

Pembangunan kualitas dan tersediaanya SDM yang baik akan menjadi faktor keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini harus didukung dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga akan menciptakan kualitas SDM yang tangguh agar siap menghadapi persaingan di era globalisasi (Majid, 2014: 20-21).

Selain itu, demi membentuk kualitas SDM yang baik, tidak dipungkiri bahwa ekonomi merupakan elemen pendukung yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui investasi dalam maupun luar negeri agar diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan upah demi mengurangi kemiskinan dan perbaikan SDM (Bappeda, n.d.:2).

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan hal serius yang perlu ditangani lebih dalam karena dapat mempengaruhi kualitas SDM yang ada di wilayah tersebut. Instrumen ekonomi masih menjadi faktor penentu terhadap korelasi antara kemiskina dan perbaikan SDM. Meski, perbaikan SDM dapat dicapai melalui perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum, Aceh menjadi salah satu gambaran Provinsi yang memiliki ketidakmerataan ekonomi yang cukup buruk. Keadaan ini disebabkan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, kualitas pendidikan yang rendah, angka pengangguran serta garis kemiskinan yang cukup buruk.

2.3 Usaha Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis agar warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan juga merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia dalam usahanya untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2011: 2). Sebagai permasalahan yang biasa di alami oleh negara berkembang, kemiskinan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk mencegah adanya ketimpangan antara kaya dan miskin (Sholeh, n.d.: 1).

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dalam tulisan Sholeh, kebijakan untuk menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua. Yaitu kebijakan tidak langsung yang meliputi: (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup serta melakukan kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan langsung meliputi: (1) melakukan pentargetan; (2) penyediaan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; serta (4) program pembangunan wilayah (Sholeh, n.d.:11).

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Terutama, di beberapa Provinsi yang dinilai masih terbelakang dan tinggi akan ketimpangan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus bersifat terencana dan sistematis, sehingga menciptakan masyarakat yang makmur dengan

peningkatan pendapatan dan pemerataan baik secara daerah maupun nasional (Busra, n.d.: 1-2).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu unsur pen jembatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Menurut Asian Development Bank, rencana pembangunan pemerintah yang dilakukan pada tahun 2010-2014 dalam mengentaskan kemiskinan terdiri dari tiga strategi. Pertama, bantuan sosial yang diberikan langsung kepada rumah tangga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat, yakni dengan menyediakan dana bagi masyarakat miskin untuk memperbaiki standar sosial dan ekonominya. Ketiga, menyediakan usaha mikro tanpa kredit untuk masyarakat miskin (ADB, 2015: 5-6). Selain dengan kebijakan domestik langsung, pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan gencar mengundang para investor untuk menanamkan modal di Aceh sehingga akan banyak membuka lapangan pekerjaan sekaligus memberantas keterbatasan ekonomi yang ada (mediaaceh.co, 2016).

Penanggulangan kemiskinan menjadi hal penting yang harus diselesaikan demi menciptakan pembangunan masyarakat yang sejahtera dan minim akan ketimpangan. Menurut Majid (2014: 17-18) pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mengembangkan SDM sehingga akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan secara langsung. Karena sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri yakni untuk menciptakan seseorang yang berkualitas sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan (Majid, 2014: 17-18). Oleh karena,

pengentasan kemiskinan tidak hanya semata-mata membicarakan tentang kecukupan ekonomi, melainkan juga pembangunan kualitas SDM yang baik.

Sebagai salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Indonesia, Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah yang berasal dari hutan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan (Pancacita Provinsi Aceh, 2015: 1). Selain itu, berdasarkan Qanun Aceh¹⁰ tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan” masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”

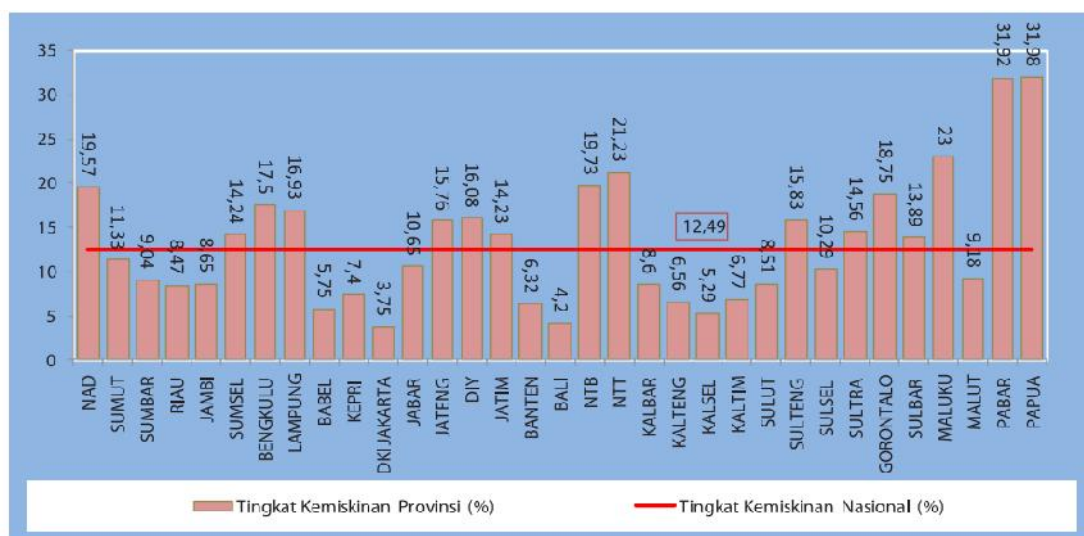
Ironisnya, meski begitu, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan nasional. Pada tahun 2014 persentase tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 18,0%, sedangkan penduduk miskin di nasional sebesar 10,96%. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka di Aceh yang berkurang sebesar 1,47% pada tahun 2008-2015, namun tetap masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional (Pancacita Provinsi Aceh, 2015: 2-3).

Ketidakmerataan kemiskinan di Indonesia salah satunya dapat digambarkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Tabel berikut menjelaskan adanya ketimpangan antar

¹⁰Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan atau sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Aceh paska pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956.

provinsi yang ada di Indonesia, sekaligus menjelaskan posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:

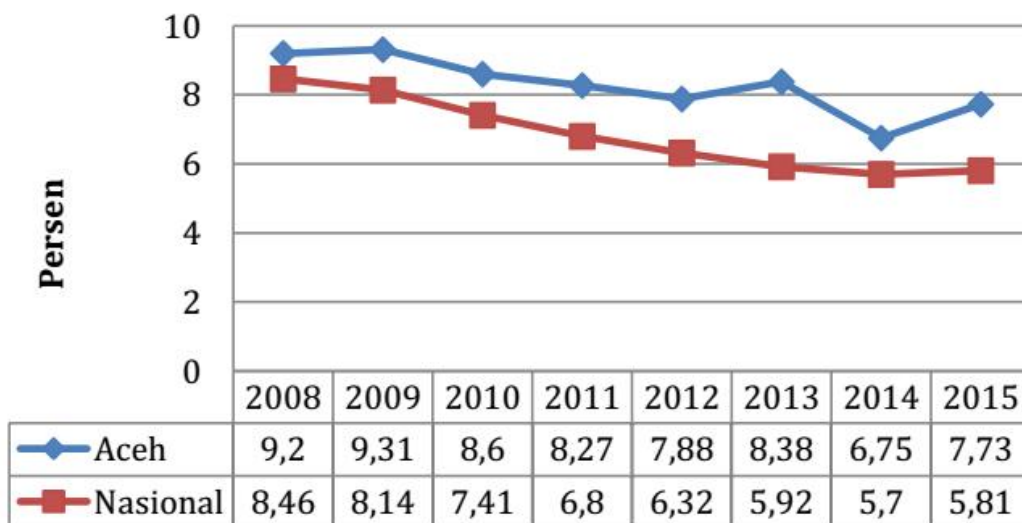
Grafik 2.2
Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011



Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2011

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa Aceh berada pada posisi keempat tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, yakni sebesar 19,57%. Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Papua sebesar 31,98%, lalu Papua Barat sebesar 31,92% dan NTT sebesar 21,23%.

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh Tahun 2008-2015



Sumber: Pancacita Provinsi Aceh Tahun 2015

Berdasarkan grafik di atas, dapat dipahami bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka di Aceh jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Aceh juga tergolong fluktuatif. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi peningkatan yakni sebesar 9,2% dan 9,31%. Sedangkan pada tahun 2010 hingga 2012 terdapat penurunan masing-masing sebesar 8,6%, 8,27% dan 7,88%. Selanjutnya, pada tahun 2013 meningkat kembali sebesar 8,38% dan menurun kembali sebesar 6,75% pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan sebesar 7,73%.

Fenomena tingginya angka kemiskinan di Aceh membuat pemerintah pusat maupun provinsi mencanangkan berbagai program dan kebijakan demi mengatasi

masalah kemiskinan ini. Salah satu yang dilaksanakan oleh Provinsi Aceh adalah program *pro-poor* Aceh, yakni program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 yang berupaya untuk secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Program ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: (1) program yang spesifik dengan menargetkan penyebab kemiskinan atau penerima manfaatnya adalah masyarakat miskin; (2) program yang meningkatkan kondisi masyarakat miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian; (3) program yang menargetkan penurunan biaya hidup bagi masyarakat miskin (Bappeda, n.d.: xi).

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang sesuai dengan kriteria kebijakan *pro-poor* Aceh diantaranya adalah; meminimalisir kesenjangan antara desa dan kota dengan membantu mengatasi kemiskinan pada kelompok nelayan dan petani sebagai kelompok terbesar yang perlu diberikan program. Lalu program prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi demi pendukung investasi. Serta program pemerataan kesempatan belajar dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Bappeda, 34-40).

Bersamaan dengan usaha untuk menjalankan program dan upaya pengentasan kemiskinan tersebut, upaya untuk peningkatan dan perbaikan ekonomi juga perlu dijalankan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan investasi swasta baik dari dalam maupun luar untuk menambah anggaran demi penyempurnaan program. Mengingat, pada tahun 2017 Aceh memiliki misi untuk dapat membangun citra sebagai tujuan utama investasi dengan memprioritaskan pengembangan potensi

daerah kabupaten/kota (Badan Investasi dan Promosi Aceh, 2014: 5-7). Oleh karenanya tidak hanya berfokus pada pengerjaan program, melainkan juga berusaha untuk mengoptimalkan program dengan pendanaan yang cukup dan memadai.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan khususnya di Aceh diliputi dengan beberapa strategi dan rencana pembangunan daerah. Secara khusus, program *pro-poor* yang dilaksanakan di Aceh menjadi salah satu bagian dari RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) yang dilakukan oleh pemerintah. Program ini dilakukan demi upaya menanggulangi besarnya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Aceh. Di samping itu, tidak hanya melakukan implementasi pengembangan langsung melalui program *pro-poor*, namun juga peningkatan dan pengembangan kualitas SDM serta ekonomi sebagai salah satu unsur penting dalam perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi dalam hal ini salah satunya dapat dicapai dengan gencar melakukan investasi pihak swasta baik dari dalam maupun luar terutama di wilayah Aceh.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dewasa ini, kerja sama regionalisme merupakan implementasi intensitas hubungan negara yang semakin berkembang. Peningkatan intensitas tersebut berkembang menjadi kerangka kerja sama regionalisme. Kerja sama sub-regionalisme merupakan gambaran akan pentingnya pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang hingga saat ini masih menjadi standar kemajuan suatu negara. Berangkat dari kesamaan ideologi, budaya, sosial maupun politik kerja sama sub-regional

memberikan harapan baru terutama bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan integritas regionalisme dalam lingkup besar dan sub-regionalisme dalam lingkup kecil.

Seiring dengan hal tersebut, peningkatan kerja sama melalui sub-regionalisme juga diharapkan memberikan efek peningkatan ekonomi yang lebih nyata. Sub-regional juga dapat menyokong dan membantu antar negara anggota dalam lingkup yang lebih kecil. Keberadaan sub-regional juga diharapkan dapat memberikan sebuah perkembangan keberhasilan demi kerja sama yang lebih efektif.

IMT-GT merupakan implementasi dari berkembangnya kerja sama sub-regional dalam regionalisme ASEAN. Kehadiran IMT-GT sebagai kerja sama berbasis ekonomi dengan berbagai program yang ditawarkan, diharapkan dapat memberikan peluang untuk menjadi sub-regional yang baik. Tentunya, kesuksesan sebuah kerja sama dapat memberikan dampak positif bagi program yang ditawarkan.

Program HRD merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mengurangi kemiskinan di wilayah terpilih dari negara anggota yang dianggap masih sangat perlu untuk dikembangkan. Beberapa kinerja dari program HRD tertuang selama kurun waktu periode 2007-2011 dan dilanjutkan kembali pada 2012-2016. Sesuai dengan tujuan berdirinya kerangka kerja sama IMT-GT dan program HRD secara khusus, keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebagai salah satu wilayah yang butuh untuk dikembangkan, Aceh merupakan wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Fakta-fakta

yang dijabarkan atas keterbelakangan ekonomi di Aceh menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah. Secara khusus, pemerintah melakukan berbagai usaha untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi angka pengangguran serta mengembangkan sumber daya manusia.

Keadaan ini tentu berbanding lurus dengan kehadiran program HRD IMT-GT yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan Aceh, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai sebuah unsur krusial untuk dapat memajukan dan mengembangkan wilayah tersebut. Melalui penjelasan di atas, maka pada bab selanjutnya penelitian ini akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan IMT-GT terkait implementasinya dalam program HRD di Aceh dengan menjabarkan temuan penelitian akibat dari tingginya angka kemiskinan di Aceh.